

2010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2010 dapat tersusun.

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi Negara merupakan suatu keharusan, karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan akuntabilitas kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggung jawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari satu unit kerja

Segala kekurangan dan kekhilafan sudah pasti akan dijumpai dalam LAKIP ini, dan kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dari semua pihak sehingga ditahun mendatang kami bisa menyajikan LAKIP yang lebih sempurna.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya LAKIP ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi, semoga LAKIP ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jakarta, Februari 2011
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
Dan Tata Usaha Negara

TTD

SONSON BASAR, SH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Susunan Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	5
A. Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.....	5
1. Target Pencapaian Visi.....	5
2. Asumsi dan Dasar Penetapan Visi	6
3. Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	7
4. Asumsi dan Dasar Pemikiran Misi	7
5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2010-2014	7
B. Rencana Strategik	8
1. Rencana Jangka Panjang	8
2. Rencana Jangka Menengah	9
3. Rencana Kegiatan Tahunan Direktorat Jendral Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2010	12
C. Penetapan Kinerja Tahun 2010	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2010.....	17
B. Analisis Capaian Kinerja.....	18
C. Akuntabilitas Keuangan.....	20
BAB IV PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi Negara merupakan suatu keharusan, hal ini dikatakan demikian karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan akuntabilitas kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban dari satu unit kerja terhadap public. Pertanggung jawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari satu unit kerja.

Lakip dibuat dapat juga dijadikan bahan standar kemampuan dari suatu unit kerja dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari satu unit organisasi berdasarkan rencana strategik dan penetapan kinerja dari satu unit kerja (target yang akan dicapai dari satu unit kerja). Sehingga dalam merencanakan program kerja yang diuraikan dalam kegiatan akan berdasarkan kemampuan dari unit kerja yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2010 didasarkan pada Perolehan Pagu Anggaran yg diperoleh dari DIPA tahun 2010 sebesar Rp. 12.837.928.000 (Dua belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). serta realisasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 12. 197.308.219,- (dua belas milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus Sembilan belas rupiah)

B. Tugas Pokok dan Fungsi :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2005 tentang Sekretariat

Mahkamah Agung. sedang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MAISEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. Jumlah Unit Kerja :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara membawahi 5 unit kerja eselon II, 15 unit kerja eselon III dan 46 unit kerja eselon IV. Penyandang jabatan unit eselon I ini baru dilantik pada bulan Juni 2006, sedang penyandang jabatan eselon II pada bulan Juli 2006 dimana selanjutnya penyandang jabatan eselon III baru terisi pada bulan Januari 2007, penyandang jabatan eselon IV dapat terpenuhi pada bulan Agustus 2007., sampai pada tahun anggaran 2010 staf dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebagian besar merupakan pemangku jabatan struktural, sedangkan pegawai non struktural lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang memiliki jabatan struktural. Jumlah pemangku jabatan structural eselon I sampai dengan eselon IV berjumlah 67 orang, sedang pegawai non structural berjumlah 30 orang.

2. Tugas pokok dan Fungsi :

Dalam surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan penyelesaian administrasi penelaahan berkas perkara pidana Militer dan Tata Usaha Negara.

Sedang mengenai fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan,

Pranata dan Tata Laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan tata usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Pemberian teknis dan evaluasi
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

C. Susunan Organisasi

Unit Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara membawahi :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara.

D. Sistematika Penyajian :

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara disajikan dalam susunan :

Bab I Pendahuluan

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Bab IV Penutup

LAKIP DITJENMILTUN 2010

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Visi Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara :

Guna mencapai Visi Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai Visi : “ **Mewujudkan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung**”

1. Target Pencapaian Visi :

Pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tersebut diatas diharapkan dapat tercapai pada tahun 2014. Hal ini dikatakan demikian karena semenjak tahun 2007 tahap pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah dapat terlaksana secara bertahap, seperti misalnya pengisian jabatan structural, mutasi dan promosi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara maupun lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta kegiatan pembinaan tenaga teknis di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang secara rutin dilaksanakan. Target pencapaian visi tersebut merupakan rencana jangka panjang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sedang pelaksanaannya akan dilakukan melalui pelaksanaan rencana jangka menengah yang dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, atau dapat dikatakan sebagai rencana jangka menengah tahap pertama, target pencapaian visi ini merupakan suatu target pencapaian visi Mahkamah Agung, hal ini dikatakan demikian karena Direktorat jendral badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai supporting unit dibidang pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan akan mempengaruhi target pencapaian visi Mahkamah Agung.

2. Asumsi dan Dasar Penetapan Visi :

Penetapan visi tersebut diatas didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai berikut :

a. Tingkat stabilitas nasional yang memadai dalam jangka panjang :

Stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum dan ekonomi merupakan faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi berhasilnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan visi Direktorat Jenderal.

b. Terintegrasinya kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga Legislatif, Yudikatif dan eksekutif :

Integrasi kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga legislatif, Yudikatif dan eksekutif dalam jangka panjang merupakan faktor kedua yang mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan. Komitmen adanya kesetaraan dari ketiga komponen yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen kesetaraan antar pemegang mandat Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif terhadap pelayanan publik dalam rangka penegakan hukum pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

c. Komitmen dari Seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradiulan Tata Usaha Negara :

Komitmen ini merupakan suatu komitmen dari Pejabat struktural maupun fungsional serta pegawai yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan visi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Komitmen ini diperlukan mengingat sering terjadinya pergantian unsur pimpinan dan rotasi pegawai Mahkamah Agung, namun dalam rangka pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tidak akan merubah apa yang menjadi visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

3. Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Misi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai apa yang menjadi visi atau harapan yang hendak dicapai oleh satu unit organisasi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam mencapai visinya mempunyai misi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Terwujudnya suatu pelayanan dari sumber daya manusia yang profesional dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 2). Terwujudnya suatu pelayanan yang tertib dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3). Terwujudnya suatu pelayanan yang Transparan dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

4. Asumsi dan Dasar Pemikiran Misi :

Misi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara didasarkan atas :

- a. Ketersediaan standar-standar operasional minimal untuk system atau mekanisme pada Mahkamah Agung yang diyakini dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- b. Ketersediaan pagu anggaran operasional pada standar ideal untuk memenuhi mandat lembaga yudikatif yang sangat erat kaitannya dengan pembinaan administrasi peradilan yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2010-2014

Pada tahun anggaran 2009 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga telah membuat Draft Visi dan Misi untuk tahun 2010-2014.

a. Visi :

Pada dasarnya visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagian dari visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014, visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan adalah ***”terwujudnya Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung”***.

b. Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan profesionalisme aparatur Ditjen Badilmiltun serta tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara dan administrasi fasilitatif pada Ditjen Badilmiltun dan Badan Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara
- 3) meningkatkan standarisasi pranata dan tata laksana perkara pidana Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) meningkatkan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi fasilitatif Ditjen Badilmiltun, Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

B. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melakukan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

1. Rencana Jangka Panjang

Visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas merupakan Rencana jangka panjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

2. Rencana Jangka Menengah :

Rencana jangka menengah merupakan rencana program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara periode tahun 2010 s.d 2014.

a. Tujuan :

Tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2010 – 2014 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Aparatur/Tenaga Teknis Peradilan Militer dan *Peradilan Tata Usaha Negara yang Profesional.*
2. Kegiatan Peningkatan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang modern.
3. Kegiatan Peningkatan penelaahan berkas perkara Pidana Militer dan perkara Tata Usaha Negara.
4. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi
5. Program dan kegiatan yang berlangsung selama ini, bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang melaksanakan pembinaan untuk lingkungan peradilan militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan pembinaan yang telah berlangsung pada tahun 2010, telah dilaksanakan untuk beberapa lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan melalui beberapa program yang ada dalam DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2010.

Dari DIPA tersebut diatas telah ditetapkan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Utama : Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

Dasar Hukum : Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/05/2007/Tanggal 31 Mei 2007

- a Organisasi** **Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara**
- b Tugas** Membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- c Fungsi**
- 1 Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
 - 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
 - 3 Perumusan standar, norma, criteria, dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

- 4 Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
- 5 Pelaksanaan administrasi Direktorat.

d IKU*

No	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA
1	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Penyelesaian putusan perkara di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha negara 	Membandingkan kinerja Tenaga teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara setelah adanya Pembinaan Tenaga Teknis di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.	Laporan Keadaan Perkara dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara 	Mengukur tingkat pelayanan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam bidang usulan mutasi dan promosi tenaga teknis Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.	Laporan Mutasi dan Promosi Tenaga Teknis Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara
3	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer yang lengkap 	Mengukur tingkat pelayanan Direktorat jendral Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam bidang Penelaahan berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer.	Laporan Keadaan Perkara dari Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
4	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, PK, HUM serta Sengketa Pajak yang lengkap 	Mengukur tingkat pelayanan Direktorat jendral Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam bidang Penelaahan berkas perkara Kasasi, PK, HUM serta Sengketa Pajak.	Laporan Keadaan Perkara dari Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara
5	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Penggunaan Sarana Perkantoran dalam menunjang fungsi dan peran organisasi 	Mengukur tingkat penggunaan sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang fungsi dan peran organisasi	Laporan realisasi Pengadaan barang dan jasa
6	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penggunaan teknologi informatika dan website dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan peran organisasi 	Mengukur tingkat penggunaan teknologi informatika dan website dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan peran organisasi	Laporan Penggunaan Teknologi Informatika dan Website Ditjen Badilmiltun.

Rencana Kegiatan Tahunan Direktorat Jendral Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2010

Program	Kegiatan		Target 2010	Penanggung jawab
	Sasaran	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
	Terwujudnya Peningkatan Penyelesaian Putusan Perkara di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Peningkatan Penyelesaian Putusan perkara di Pengadilan Militer 	5%	Dit Binganismin Peradilan Militer
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Peningkatan Penyelesaian Putusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. 	5%	Dit Binganismin Peradilan TUN
	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya Manusia di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Hakim di Pengadilan Militer 	100%	Dit Binganismin Peradilan Militer
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Panitera di Pengadilan Militer 	100%	
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara 	100%	Dit Binganismin Peradilan Tata Usaha Negara
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara 	100%	
	Terselenggaranya Penelaahan berkas perkara perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Berkas Perkara Kasasi Pidana Militer yang lengkap 	100%	Dit Pratalak Perkara Pidana Militer
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Berkas Perkara PK Pidana Militer yang lengkap 	100%	
	Terselenggaranya Penelaahan berkas perkara Kasasi, PK dan HUM	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Berkas Perkara grasi Pidana Militer Yang Lengkap 	100%	Dit Pratalak Perkara Tata Usaha Negara
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Berkas Perkara Kasasi yang TUN yang lengkap 	100%	
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Berkas Perkara PK TUN yang lengkap 	100%	
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Berkas Perkara HUM Yang Lengkap 	100%	
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Berkas Perkara Sengketa Pajak Yang Lengkap 	100%	
	Terselenggaranya Pemenuhan sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Penggunaan Sarana Perkantoran dalam menunjang fungsi dan peran organisasi 	100%	Sekretariat Ditjen Badilmiltun
	Terselenggaranya Pengembangan Website	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penggunaan teknologi informatika dan website dalam menunjang pelaksanaan tugas 	100%	

C. Penetapan Kinerja Tahun 2010:

Penetapan Kinerja dapat dikatakan sebagai pernyataan yang mengandung materi adanya kesediaan dari Penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh pemberi amanah. Pemberian tugas yang diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada unit kerja dibawahnya dapat dikatakan sebagai pernyataan perintah kerja dari atasan kebawah dalam kurun waktu satu tahun guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melalui program/kegiatan seperti diuraikan dalam table dibawah ini

Penetapan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai standar akuntabilitas kinerja aparatur Negara (Sumber Daya Manusia) yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, selain dari pada itu dengan adanya penetapan kinerja, hasil kerja sumber daya manusia yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan lebih mudah dievaluasi hasil kerjanya dan apabila berhasil meningkatkan kinerjanya akan mendapatkan reward sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun sebaliknya apabila hasil kerjanya tidak baik tentunya bukan reward yang diterima namun punishment.

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer tahun 2010 merupakan :

- Pernyataan dari Unit Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2010 berdasarkan Rencana strategis (Visi dan Misi) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2010 dibuat atas kesepakatan seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang penanda tangannya diwakili oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PROGRAM	SASARAN	IK OUTPUT		IK OUTCOME		ANGGARAN
		URAIAN	TAR-GET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
Program Penerapan Pemerintahan yg baik	Peningkatan Penyelesaian Putusan Perkara di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara	Prosentase Tenaga Teknis yang mengikuti Pembinaan Teknis administrasi Peradilan Militer	100%	• Prosentase Peningkatan Penyelesaian Putusan perkara di Pengadilan Militer	5%	
		Prosentase Tenaga Teknis yang mengikuti Pembinaan Teknis administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.	100%	• Prosentase Peningkatan Penyelesaian Putusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara	5%	
	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya Manusia di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	• Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Hakim di Pengadilan Militer	100%	• Prosentase Hakim Pengadilan Militer yang memahami kesepecefikasian tindak pidana suatu daerah	60%	
		• Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Panitera di Pengadilan Militer	100%	• Prosentase Panitera Pengadilan Militer yang memahami kesepecefikasian tindak pidana suatu daerah	60%	
		• Prosentase sulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara	100%	• Prosentase Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memahami kesepecefikasian tindak pidana suatu daerah		
		• Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara	100%	• Prosentase Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang memahami kesepecefikasian tindak pidana suatu daerah		
Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya	Terselenggaranya Pemenuhan sarana dan Prasarana	• Prosentase pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100%	• Prosentase Penggunaan Sarana Perkantoran dalam menunjang fungsi dan peran organisasi		
	Terselenggaranya Pengembangan Website	• Prosentase terlaksananya Pengembangan Website di Ditjen Badilmiltun.	50%	• Prosentase penggunaan teknologi informatika dan website dalam menunjang pelaksanaan tugas		

Dari Tabel Penetapan Kinerja Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2010 diatas , Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mempunyai sasaran dan target sebagai berikut :

- **Peningkatan Penyelesaian Putusan di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara :**

Dengan adanya sasaran ini maka seluruh Tenaga teknis baik Hakim maupun Panitera yang berada dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara harus mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. target dari kegiatan ini adalah Tenaga Teknis Peradilan Militer dari 23 Satker dan Tenaga dari 30 Satker dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruhnya mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis. Keberhasilan dari kegiatan ini akan berpengaruh pada kualitas putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan tersebut., sehingga kinerja Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dapat terlihat atau diukur melalui seberapa banyak putusan perkara yang ada di tingkat pertama dan seberapa banyak pula perkara yang masuk ke Pengadilan tingkat banding, semakin sedikit perkara yang masuk ke pengadilan tingkat banding, maka dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas putusan dari Pengadilan militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu pula dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding yang diajukan kasasi, sedang jumlah putusan yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditingkatkan sebesar 5%.

- **Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara :**

Dari sasaran ini diharapkan seluruh usulan mutasi dan promosi tenaga teknis dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diselesaikan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keberhasilan dari sasaran ini dapat dilihat pada jumlah mutasi dan promosi dilingkungan Peradilan Militer maupun lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

- **Terselenggaranya Penelaahan Berkas Kasasi Perkara Pidana Militer dan Perkara Tata Usaha Negara :**

Dari sasaran ini diharapkan akan tercapai target 100% berkas perkara yang masuk dapat ditelaah seluruhnya oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Keberhasilan kinerja dari sasaran ini dapat terlihat dengan prosentase penyerahan berkas perkara yang lengkap kepada Panitera Muda militer maupun Panitera Muda Tata Usaha Negara.

- **Terselenggaranya Pengembangan Teknologi Informatika dan Website Ditjen Badilmiltun:**

Dari sasaran ini diharapkan akan tercapai target 50 % Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memanfaatkan Teknologi informatika baik itu merupakan sarana Komputer maupun website Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keberhasilan ini akan dapat terukur dengan adanya penggunaan sarana Komputer maupun Website Direktorat jendral Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menunjang pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2010

Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2010 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Uraian mengenai tingkat capaian kinerja masing-masing indikator yang ada dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terinci dalam table dibawah ini :

Tingkat capaian kinerja Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Program	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian Target
	1	2	3	4
Peningkatan Pelayanan bantuan Hukum	1. Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara	5%	12%	
	2. Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara	100	90	90%
	3. Terselenggaranya Penelaahan Berkas Kasasi Perkara Pidana Militer dan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara	100	100	100%
	4. Terselenggaranya Pengembangan Teknologi Informatika dan Website Ditjen Badilmiltun	50	50	100%

Tingkat capaian dari beberapa sasaran strategis berikut indikator kinerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sangat bervariasi, ada sasaran strategis yang belum berhasil secara optimal, untuk mengatasi hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara akan melakukan analisa dan evaluasi, hal ini dilakukan agar pada tahun mendatang terdapat peningkatan kinerja seperti yang diharapkan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase keberhasilan terhadap program-program yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti diuraikan dibawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1. Peningkatan Penyelesaian Putusan Perkara di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase Peningkatan Penyelesaian Putusan perkara di Pengadilan Militer 	5%	12%	240%	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Dipa	Dipa	Dipa
2. Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Hakim di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. 	100%	90%	90	Penerapan Pemerintah yang Baik	Dipa	Dipa	Dipa
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi Panitera di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara 	100%	90%	90		Dipa	Dipa	Dipa
3. Terselenggaranya Penelaahan Berkas Kasasi Perkara Pidana Militer dan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara	Prosentase Berkas Perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Negara yang lengkap	100%	100%	100	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Dipa	Dipa	Dipa
4. Terselenggaranya Pengembangan Teknologi Informatika dan Website Ditjen Badilmiltun	Prosentase Penggunaan Teknologi Informatika dalam menunjang pelaksanaan tugas	50%	50%	100	Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.	Dipa	Dipa	Dipa

1. Peningkatan Penyelesaian Putusan Perkara di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara :

Dari data laporan tahunan 2010, terlihat bahwa dari segi Keikut sertaan Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang seluruhnya berjumlah 53 satker (23 dari Pengadilan Militer dan 30 dari Pengadilan Tata

Usaha Negara) ternyata seluruhnya mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara., sedang peningkatan kualitas putusan baing pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding juga dapat dikatakan bai, hal ini dikatakan demikian karena tidak semua putusan pada tingkat pertama dimintakan banding, begitu pula dengan putusan pada tingkat banding tidak semuanya dimintakan kasasi.

Begitu Pula dengan jumlah putusan yang dihasilkan oleh seluruh Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dari target 5 % ternyata berdasarkan data keadaan perkara laporan tahunan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, ternyata bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang lalu dengan tahun 2010 ternyata ada peningkatan jumlah putusan yang dihasilkan . sampai dengan 240%. (vide lampiran keadaan Perkara). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer untuk lingkungan Peradilan Militer dan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Tata Usaha Negara untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara :

Target sasaran dari kegiatan ini belum dapat tercapai 100%. Hal ini terjadi demikian karena dari usulan mutasi tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan , yang dapat melaksanakan mutasinya hanya sekitar 90%, hambatan yang terjadi biasanya karena untuk persetujuan usulan mutasi disamping harus melibatkan unsur Pimpinan Mahkamah Agung juga melibatkan instansi lembaga diluar Mahkamah Agung RI, seperti misalnya untuk Hakim dari Lingkungan Peradilan Militer untuk mutasi kenaikan pangkatnya harus melibatkan Mabes ABRI. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer u ntuk lingkungan Peradilan Militer dan Direktorat Pembinaan Tenaga Telknis dan Administrasi Tata Usaha Negara untuk lingkngan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Terselenggaranya Penelaahan Berkas Kasasi Perkara Pidana Militer dan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara:

Target sasaran dari kegiatan ini dapat tercapai, indicator kinerjanya dapat terlihat dengan adanya pengiriman berkas perkara Pidana Militer dan Perkara Tata Usaha Negara (Kasasi, PK , HUM dan Sengketa Pajak) yang telah ditelaah dan dalam keadaan lengkap kepada Panitera muda perkara untuk dilakukan Registrasi atas perkara tersebut. Penelaahan berkas perkara sangat erat kaitannya dengan registrasi perkara, yang akhirnya akan bermuara kepada cepat atau lambatnya penyelesaian putusan perkara Pidana Militer maupun perkara Tata Usaha Negara yang ada di Mahkamah Agung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pranata dan Tata Laksana Pidana Militer dan Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara.

4. Target terselenggaranya Pengembangan Teknologi Informatika dan Website Ditjen Badilmiltun :

Target dari sasaran terselenggaranya Pengembangan Teknologi informatika dan Website Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar 50% dapat tercapai, hal ini terlihat dari dapat digunakan seluruh perangkat IT untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Target sebesar 50% .

C. Akuntabilitas Keuangan :

Dalam DIPA tahun anggaran 2010, Anggaran yg diperoleh dari DIPA tahun 2009 sebesar Rp. 12.837.928.000,- (Dua belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). serta realisasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 12. 197.308.219,- (dua belas milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus semilan belas rupiah)

bahwa anggaran yang ada dalam DIPA sebagian merupakan anggaran untuk Peningkatan Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	UNIT	PAGU	REALISASI	SALDO	%
1	Sekretariat Ditjen	10.098.707.000	10.048.509.121	57.197.879,-	99,50
2	Dit Binging & Adm Dilmil	1.264.761.000,-	940.600.344,-	324.165.656,-	74,36
3	Dit Binging & Adm TUN	1.181.501.000	971.303.963	210.196.937,-	82,20
4	Dit Pratalak Pidmil	125.000.000,-	116.700.000,-	8.300.000,-	93,36
5	Dit Pratalak TUN	167.959.000,-	127.194.791,-	40.764.209,-	75,73
Jumlah		12.837.928.000	12.197.308.219	640.624.681	95,01

LAKIP DITJENMILTUN 2010

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan program yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dapat terukur dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat juga dikatakan sebagai gambaran tentang capaian kinerja berbagai program yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Capaian kinerja dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer akan dilihat pada semakin banyaknya jumlah putusan perkara dari lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata usaha Negara.., pada tahun anggaran 2010 ini terjadi peningkatan jumlah putusan yang dihasilkan oleh Peradilan Militer dan Peradsilan Tata Usaha Negara sebesar 8%.

Segala upaya telah dilaksanakan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari visi Mahkamah Agung RI, namun demikian pelaksanaan program-program yang ada tetap mengutamakan prinsip transparansi sehingga dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) kepada public.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara koleqial dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dilaksanakan dalam rangka mengatasi kekurangan sumber daya manusia yang ada, namun prinsip koleqial dilaksanakan sangat temporary atau sangat tergantung pada jenis kegiatannya, sepanjang kegiatan tersebut sangat mendesak maka prinsip koleqial akan diterapkan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Volume kegiatan koleqial untuk tahun anggaran 2010 juga semakin berkurang sejalan dengan telah semakin tertibnya administrasi dan penambahan sumber daya

manusia di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi pertanggung jawaban maupun hasil kerjanya juga akan semakin jelas.

Laporan Akuntabilitas Instansi/ Pemerintah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ini dapat dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kepada pemberi amanah/pimpinan maupun kepada Publik dan semoga dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Jakarta, Februari 2011
Plt. Direktur Jendral Badan
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

TTD

(Sonson Basar, SH)